BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari suatu proses pembangunan yang berjalan. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (Gross Domestic Product) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana, 2000:5)

Pengertian Pertumbuhan ekonomi menurut Dr. Joko Untoro (2010:39)

"Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang."

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi menurut Kuznets dalam Buku Membuka Cakrawala Ekonomi (2009:11)

"Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan outputriil.

1. Teori Dan Model Pertumbuhan Ekonomi

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul An Inguiry into the Nature and Causes of the Wealt Nations, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi.

1. Teori Inovasi Schum Peter

Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi enterpreneur sebagai motorpenggerak pertumbuhan ekonomi kapitalilstik.Dinamika persaingan akan mendorong hal ini.

2. Model Pertumbuhan Harrot-Domar

Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural.Selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan.Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihar tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-output.

3. Model Input-Output Leontief.

Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antarindustri. Dengan menggunakan tabel ini maka perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran input-output antarindustri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah .

4. Model Pertumbuhan Lewis

Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negar sedang berkembang banyak (padat) penduduknya.Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan.

2.1.1.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

Menurut Imamul Arifin & Gina Hadi W (2009:11)

"Indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu Negara adalah tingkat Produksi Domestik Bruto (PDB)"

Beberapa alasan digunakannya PDB (bukan PNB) sebagai indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut.

1. PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan seluruh aktivitas produksi di dalam perekonopmian. Hal ini, peningkatan PDB

mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakanalam proses produksi.

2. PDB dihitung atas dasar konsep siklus aliran (circulair flow concept). Artinya, perhitungan PDB mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencangkup perhitungan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran dalam menghitung PDB memungkinkan seseorang untuk membandingkan jumlah output pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Batas wilayah perhitungan PDB adalah Negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sampai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Menurut McEachern Produk Domestik Bruto (PDB) (2000:146) bahwa:

"Produk domestik bruto / GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat."

Pengertian Produk Domestik Bruto menurut Sukirno (2004 : 17), yaitu:

"Pendapatan Nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam menggambarkan (i) tingkat kegiatan ekonomi

yang dicapai, dan (ii) perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerapkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan sesuatu negara dalam suatu tahun tertentu."

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa dalam periode tertentu. PDB ini dapat mencerminkan kinerja ekonomi, sehingga semakin tinggi PDB sebuah negara dapat dikatakan semakin bagus pula kinerja ekonomi di negara tersebut. Karena begitu pentingnya peran PDB di dalam suatu perekonomian, maka perlu kiranya untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Produk Domestik Bruto.

Faktor baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi PDB menurut teori Keynes, PDB terbentuk dari empat faktor yang secara positif mempengaruhinya, keempat faktor tersebut adalah konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) dan ekspor neto (NX).

2.1.1.2 Inflasi

Pengertian inflasi secara umum dapat diartikan sebagai kenaikan harga-harga umum secara terus menerus dalam suatu periode tertentu. Ada beberapa jenis inflasi dalam jurnal (Pengaruh pertumbuhan Ekonomi, inflasi, dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999-2009).

2.1.1.2.1 Jenis-jenis Inflasi

Inflasi dapat digolongkan sebagai berikut (Samuelson dalam Nurfitri Yanti, 2011:30):

1. Penggolongan berdasarkan sifatnya.

a. inflasi ringan (<10% setahun), ditandai dengan kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relative.

b. Inflasi sedang (10%-30% setahun), ditandai dengan kenaikan harga yang relative cepat atau perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian.

c. Inflasi berat (30%-100% setahun), ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relative pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan sebelumnya.

d. Hiper inflasi)>100% setahun), dimana inflasi ini paling parah akibatnya. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang, nilai uang merosot dengan tajam, sehingga ditukar dengan barang. Harga-harga naik lima sampai enam kali. Biasanya keadaan ini timbul oleh adanya perang yang dibelanjai atau ditutupi dengan mencetak uang.

2. Berdasarkan sebab terjadinya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Nopirin 1992 dalam Vio Achfuda, 2010:41):

a. Demand Pull Inflation

Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat terhadap akan berbagai barang terlalu kuat. Demand pull inflation terjadi karena kenaikan permintaan agregat dimana kondisi perekonomian telah berada pada kesempatan kerja penuh. Jika kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh.

Kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh, maka kenaikan permintaan tidak lagi mendorong kenaikan output ataupun produksi tetapi hanya mendorong kenaikan harga-harga yang disebut inflasi murni. Kenaikan permintaan yang melebihi produk domestic bruto akan menyebabkan inflationary gap yang menyebabkan inflasi.

2. Cost Push Inflation

Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Pada cost push inflation tingkat penawaran lebih rendah dibandingkan tingkat permintaan. Karena adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai pada jumlah tertentu. Penawaran agregat terus menurun karena adanya kenaikan biaya produksi.

3. Mixed Inflation

Gejala kombinasi antara unsur inflasi yang disebabkan karena kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Pada umumnya bentuk yang sering terjadi adalah inflasi campuran yaitu kombinasi dari kenikan permintaan dan keniakan biaya produksi dan sering sekali keduanya saling memperkuat satu sama lain.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Djajadiningrat dalamDiana Sari (2013:33) adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung."

Definisi pajak yang terkenal dalam dunia akademik dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (2004;139) yaitu:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Dari definisi di atas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan Undang-undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayarpajak maupun yang tidak membayar pajak.

Undang-undang perpajakan sendiri tidak memberikan definisi pajak sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Baru pada Undang-undang inilah definisi pajak dicantumkan. Adapun definisi pajak menurut Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Definisi versi UU KUP ini nyaris hampir sama dengan definisi Rochmat Soemitro. Kata-kata "iuran" diganti dengan kata "kontribusi" yang nadanya lebih bersifat positif karena mengandung makna partisipasi masyarakat. Kemudian ada tambahan "bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang membuat kata pajak lebih bernilai positif karena untuk tujuan kemakmuran rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya.

2.1.2.2 Subjek Pajak

Dalam pelaksanaan fungsinya pajak juga memiliki standarisasi persyaratan dalam menentukan subjek pajaknya. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Pengertian dan penjabaran subjek pajak dalam negeri dan luar negeri yang dijabarkan berdasarkan Pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan adalah:

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah :
   a. 1) Orang pribadi;
      2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
   b. Badan;
   c. Bentuk usaha tetap.
(2) Subjek pajak yang terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
(3) Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:
   a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
   1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
   2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
   4) dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

(4) Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:
   a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
   b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh

penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

(5) Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

a. Tempat kedudukan manajemen.
b. Cabang perusahaan.
c. Kantor perwakilan.
d. Gedung kantor.
e. Pabrik.
f. Bengkel.
g. Gudang.
h. Ruang untuk promosi dan penjualan.
i. Pertambangan dan penggalian sumber alam.
j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.

o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan

p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal tiga sistem penggolongan pemungutan yang dapat digunakan, menurut Siti Resmi (2008:11) tiga kelompok sistem pemungutan tersebut adalah:

a. ***Official Assessment System***

Sistem ini memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. ***Self Assessment System***

Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung, melaporkan, serta menyampaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

c. *With Holding System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.4 Penerimaan Pajak

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeu.go.id), menyatakan bahwa:

"Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Selama lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan rata-rata sekitar 70 persen dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Peran pajak tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi peran utang dalam mendanai APBN. Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat."

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2008-2014.

2.1.3 Keterkaitan antar Variabel Penelitian

Teori pendukung yang menghubungkan menurut Hatta Rajasa (2010) dalam Koran Kompas sebagai berikut:

"Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, jika ekonomi meningkat, tentu pajak akan meningkat."

Sedangkan menurut Menteri Keuangan dalam Harian Ekonomi Neraca (2010) yang menyatakan bahwa:

"Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh kepada penerimaan perpajakan, namun pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan penerimaan perpajakan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensikasi."

2.1.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu tolak ukur perkembangan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka semakin bagus tingkat perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang

bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Kuznets dalam Purnamasari, 2009:11). Sehubungan dengan hal ini Fuad Rahmany dalam antaranews (2012) mengemukakan perlambatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan penerimaan pajak. Selain itu Bruckner (2011: 9) dalam penelitianya menemukan bahwa kenaikan produk domestik bruto dalam suatu negara dapat mempengaruhi penerimaan pajak negara tersebut. Berdasarkan urian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin besar penerimaan dari sektor perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Materi dalam penelitian ini penulis lakukan dengan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan judul penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil
1	Purnamasari (2011)	Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak.	Berdasarkan penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.
2	Rakiman Sarsiti	Pengaruh pendapatan	Berdasarkan penelitian ini

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil
	(2011)	perkapita dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo periode 2002-2010.	dibuktikan bahwa pendapatan perkapita dan jumlah wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
3	Nadya Fazriana Haniz, Hadi Sasana/2013	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal.	Hasil Analisis Menunjukkan Bahwa Pendapatan, Pembayar Pajak, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Per-KapitaKota Tegal Sejak Tahun 1991 Sampai 2010 Th Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Di KotaTegal, Sementara Inflasi Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Di Kota Tegal.
4	Dewa Made Arta Wijaya/2012	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Inflasi Regional Terhadap	Berdasarkan Hasil Analisis Diketahui, Bahwa Secara Parsial Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Bali Berpengaruh Positif

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil
		Ppn Dn Di Bali.	Dan Signifikan Terhadap Realisasi Penerimaan PPN Dalam Negeri Di Bali Periode April 2010 - September 2012, Namun Tingkat Inflasi Regional Provinsi Bali Tidak Berpengaruh Terhadap Realisasi Penerimaan PPN Dalam Negeri Di Bali Periode April 2010 - September 2012.

2.3 Kerangka Pemikiran

Krisis global adalah salah satu dilema yang sedang dihadapi Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Dan ini adalah dinamika kehidupan ekonomi yang tidak tetap perubahannya. Kadang sistem ekonomi dunia naik, kadang sistem ekonomi dunia merosot drastis. Ini menyebabkan gejolak besar bagi kehidupan ekonomi seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi Indonesia adalah bagian dari ekonomi global, sudah tentu akan memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung. Dampak krisis ekonomi global, mengancam pembangunan di Indonesia. Krisis akan mengakibatkan guncangan struktural, gucangan ekonomi akan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi efek tersebut akan mempengaruhi penerimaan pajak Negara.

Produk Domestik Bruto merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan slahsatu asumsi makro ekonomi yang digunakan untuk mengetahui besaran penerimaan pajak.

Pajak merupakan pendapatan utama negara saat ini dengan kontribusi mencapai 70-75%. Besar kecilnya jumlah pajak yang diterima oleh negara akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah kas negara. Hal ini menyebabkan perlunya memperhatikan jumlah penerimaan pajak dari tiap wilayah. Pertumbuhan ekonomi diprediksikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Hal ini diungkapkan oleh beberapa peneliti sebelumnya melalui hasil penelitianya.

Menurut hasil penelitian Roshaiza Taha, Loganathan, Nanthakumar dan Sisiran R.N. (2011) menyatakan bahwa penelitian tersebut menujukan bahwa perubahan pajak tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat membantu menaikan penerimaan pajak.

Kondisi yang juga menjadi variabel penting dalam mendongkrakpendapatan pajak adalah stabilitas ekonomi. perkembangan ekonomi nasional dan global. Perubahan yang tidak terduga dalam perekonomian akan berpengaruh secara otomatis penerimaan pajak. Menurut hasil penelitian Eddy (2006) Paling tidak terdapat lima variabel penting untuk dikendalikan yaitu konsumsi minyak, harga minyak, inflasi dalam negeri, uang beredar dan nilai tukar. Strategi pengendali dalam

rangka pengamanan penerimaan pajak didasarkan pada sinyal yang diberikan oleh TEWS.

Purnamasari (2011) melakukan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dalam pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa variabel tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi tersebut terhadap penerimaan pajak setelah terjadinya perkembangan ekonomi Indonesia beberapa tahun ini.

Skema Kerangka Berpikir

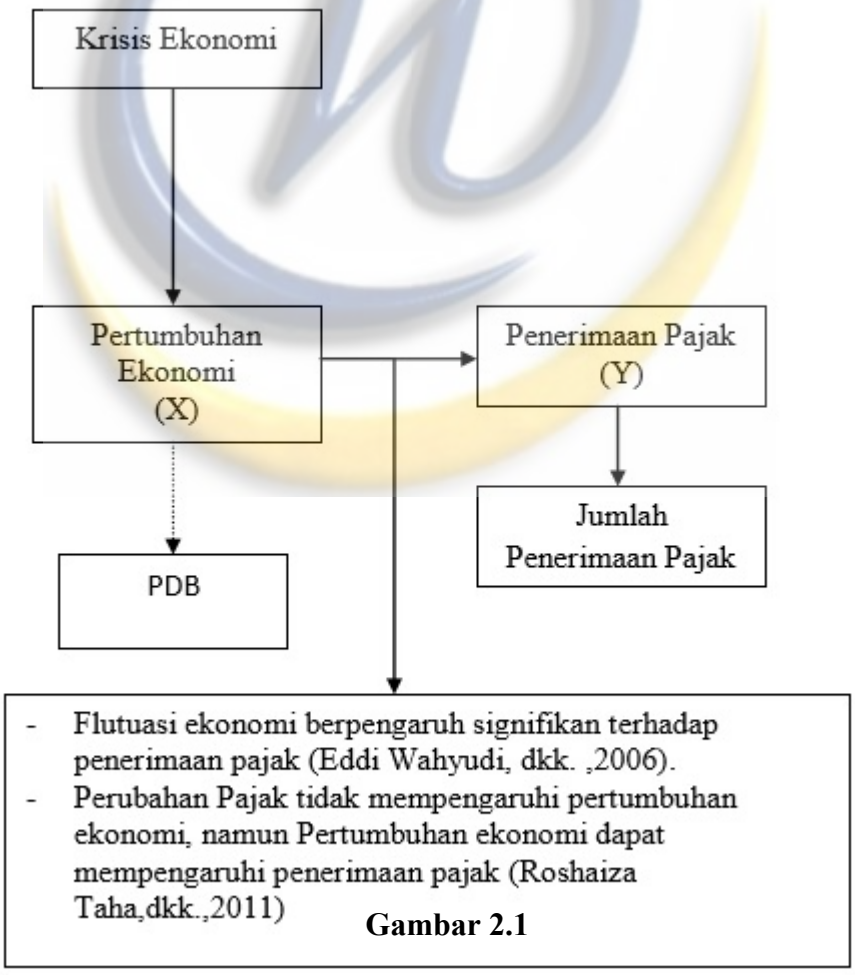

Gambar 2.1

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang perlu dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara sebagai berikut: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia yang akan diuji kebenaranya melalui penelitian ini secara parsial dan simultan adalah:

H_{01}: Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia.

H_{11}: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia.